

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Ada 23 Transaksi Mencurigakan
Entitas / Cakupan	: Pemprov
Sumber / Hal	: Radar Bandung / Hal.1
Edisi	: Jum'at, 8 Juni 2018

Ada 23 Transaksi Mencurigakan

Sekitar 143 transaksi terendus mencurigakan terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) se-Indonesia. Dari sejumlah itu, tercatat 23 transaksi mencurigakan ada di pilkada di wilayah Jawa Barat. Hal ini dibeberkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru-baru ini.

■ ADABaca Hal 2

■ Sambungan dari Hal 1

Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae lebih rinci menyebut bahwa pihaknya juga mencatat ada sekitar 1.092 laporan transaksi tunai yang mencurigakan pada perhelatan Pilkada seluruh Indonesia. Dari sejumlah itu diketahui mayoritas dilakukan oleh petahanan.

"Dana seharusnya satu rekening, ini malah dilakukan banyak rekening. Bahkan dari penelusurannya dana tersebut diragukan sumber dananya dan asal usulnya tidak jelas, bahkan diduga dana yang digunakan berasal dari hasil kejahatan," ujar Dian.

Dian juga kembali menyosal pemilukada di Jabar yang menyebutkan ada laporan transaksi keuangan tunai sebanyak 70 transaksi yang mencurigakan. "Jawa Barat merupakan penduduk terbanyak dan menjadi barometer, sehingga menjadi sorotan kami untuk melakukan pemantauan," ujarnya.

Selain itu, menurut Dian, PPATK juga menyoroti adanya pemberian kredit besar-besaran yang menyangkut orang terkait pemilukada. Misalnya adanya pemberian kredit multi-guna, dinilai pemberian kredit itu tidak aman dan ceroboh karena diberikan tanpa agunan dan sekarang sedang dianalisis oleh PPATK.

PPATK sendiri meminta agar masalah ini segera ditanggapi serius dan jadi perhatian sehingga terjadi perubahan dan diharapkan outputnya pilkada kita berjalan lancar dan berkualitas. "Kami harapkan semua pihak ikut menyoroti termasuk media massa, agar mereka berhati-hati dan tidak menggunakan

anggaran negara untuk kepentingan tertentu atau golongannya," ujar Dian.

Dari pantauan tersebut, Dian juga menyebutkan bahwa transaksi tunai yang mencurigakan dan diduga terkait pilkada ini kalau dijumlahkan secara keseluruhan nominalnya sekitar 1 triliun rupiah. Memang jumlah tersebut belum tentu melanggar, tetapi menjadi pantauan kami dan sekarang sedang dianalisa, dan hasilnya nanti akan diserahkan ke KPK, Bawaslu atau polisi.

Dian menambahkan, hal itu tergantung temuannya, apakah terkait politik atau ada unsur pidananya. "Kami juga sudah membuat Mou antara bawaslu, KPK dan polisi sehingga memudahkan untuk tindak lanjut bila ada temuan," ujarnya.

Lebih lanjut, Dian Ediana, menyatakan titik lemah dalam penyelenggaraan pilkada masih ada, berdasarkan hasil riset PPATK pada pilkada sebelumnya ditemukan adanya penggunaan rekening sembarangan. "Nah fenomena ini juga pada pemilukada saat ini masih dilakukan pada beberapa tempat. Dari itulah perlu pengawasan semua pihak untuk menghentikannya," ujarnya.

Sejauh ini juga PPATK juga mengawasi semua transaksi para pejabat, atau pejabat politik karena mereka dinilai paling rawan dan kemungkinan penyalangunaannya tinggi mengingat mereka semua punya kekuasaan untuk menggunakan anggaran.

"Sekitar 77 ribu rekening nama pejabat tokoh politik, termasuk di Jabar diawasi," katanya.

Dian Ediana juga mengaku bahwa PPATK saat ini tengah

menyusun rancangan undang-undang pembatasan transaksi tunai. Draftnya kini sudah diserahkan ke presiden, kalau disetujui nanti akan disampaikan ke DPR. "Salah satu aturan dalam RUU tersebut adalah mengawasi uang cash, ke depan akan dibatasi transaksi uang cash maksimal transaksi 100 juta rupiah," katanya.

Dian Ediana juga menyebutkan bahwa pihaknya memantau terus aliran dana untuk kegiatan terorisme, pihaknya melakukan kerjasama dengan beberapa pemangku kekuasaan seperti Densus 88, BIN, BPNPT dan beberapa intelijen negara lain karena kegiatan terorisme itu saat ini sudah lintas negara.

Seperti menerima suplai informasi dari Malaysia, dari Filipina dan negara tetangga lainnya mengenai adanya aliran dana untuk kegiatan terorisme.

Dian Ediana juga menyatakan selama kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2018, PPATK menerima 71.185 laporan, kemudian menyampaikan 516 laporan ke polisi 231, ke KPK 143 dan ke Kejagung 58 laporan. Untuk kasus tindak pidana terbesar di dominasi oleh kasus korupsi yakni sekitar 246 laporan atau sekitar 47 persen.

"Kasus korupsi yang sedang ditangani oleh PPATK diantaranya, kasus proyek di bidang minyak dan gas, kerugian negara 169 miliar, kasus korupsi penyalahgunaan investasi di bidang minyak dan gas, kerugian negara Rp 568 miliar, kasus korupsi dana alutsista di lingkungan TNI, kasus korupsi BUMN dengan kerugian negara Rp 35 triliun dan beberapa kasus korupsi kepala daerah. (pik/net/peh)